



Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina

Melinda Trisnawati^{1*}, Najamuddin Khairur Rijal¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Korespondensi: mlndtrisnawati@gmail.com

Info Artikel

Diterima 17 Juni
2022

Disetujui 01
Agustus 2022

Dipublikasikan 14
Agustus 2022

Keywords:
Eksploitasi
Seksual; Filipina;
Online

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Child Right Network dalam menangani eksploitasi seksual online terhadap anak di Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta melakukan analisa dengan menggunakan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut sebuah studi pemerintah Filipina, 1 dari 2 anak menjadi korban kekerasan di internet, bentuk kejahatan yang terjadi paling banyak merupakan pelecehan dan eksploitasi seksual online. Maka, penulis menggunakan pendekatan landasan konseptual transnational advocacy network dengan pola boomerang. Konsep ini menjadi dasar yang digunakan untuk menganalisa strategi penanganan eksploitasi seksual online terhadap anak di Filipina. Hasilnya ditemukan bahwa strategi yang digunakan dapat menyebarkan advokasi pemahaman secara meluas termasuk dalam pemerintah sehingga kebijakan pemerintah mengenai rancangan undang-undang dalam memberikan perlindungan lebih kuat terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual secara online telah resmi disahkan sebagai Undang-undang Republik 11930.

Abstract

This study aims to examine Child Right Network's strategy in dealing with online sexual exploitation of children in the Philippines. This research uses a descriptive qualitative approach and conducts analysis using data related to the research topic. According to a Philippines government study, 1 in 2 children are victims of violence on the internet, the most common form of crime is online sexual abuse and exploitation. With that, the author uses an approach with the conceptual framework of transnational advocacy network with a boomerang pattern. This concept is the basis used to analyze strategies in handling online sexual exploitation of children in the Philippines. The results found that the strategy used could spread advocacy widely so The bill providing stronger protections against Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) has lapsed into law as Republic Act 11930.

1. Pendahuluan

Eksploitasi seksual terhadap anak secara online menjadi masalah yang sangat umum di seluruh dunia, eksploitasi seksual terhadap anak secara *online* merupakan bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi secara *virtual*, di situs web dan platform media sosial. Eksploitasi ini mencakup pembuatan dan distribusi materi *online* yang berisi gambar pelecehan terhadap

anak, perawatan anak korban *online* dengan tujuan eksploitasi atau pelecehan seksual, serta *live streaming* dalam melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dan pemerasan secara seksual terhadap anak (ECPAT, 2017).

Tercatat dalam *report in person* tahun 2021 bahwa Filipina merupakan salah satu negara di Asia Timur dan Pasifik yang menduduki *tier 1* dalam eksploitasi seksual dari tahun 2016 hingga 2021 (Department of State United States of America, 2021). Namun tingkat eksploitasi seksual *online* meningkat dalam masa pandemi Covid 19 ini dengan kenaikan sebanyak 264 persen yang mana setara jumlahnya dengan kasus eksploitasi seksual pada tahun 2019. Selain Filipina terdapat juga korea selatan yang menduduki *tier 1*, sebagai negara maju yang tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat atas dalam human development (Kumalasari & Rosyida, 2022) hal ini tidak menutupi korea selatan dari kasus eksploitasi seksual secara online terhadap perempuan, tercatat bahwa terdapat satu kasus dengan pengadilan yang menjatuhkan hukuman selama 40 tahun penjara kepada satu pelaku karena memimpin organisasi yang mana memaksa lebih dari 100 perempuan dan anak perempuan untuk membuat video tindakan seks dan gambar yang diunggah dan dijual di ruang obrolan *online/chatroom* (United States Department of State, 2021d).

Dengan adanya peningkatan dalam bentuk eksploitasi seksual secara online dalam masa pandemi, memaksa banyak orang beralih daring, termasuk perdagangan manusia, perekrutan dan pekerjaan *online* meningkat karena anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu *online* untuk pembelajaran *virtual* karena penutupan sekolah, dan diikuti seringkali dengan sedikit pengawasan orang tua. Laporan dari beberapa negara menunjukkan peningkatan drastis eksploitasi seksual komersial *online* dan perdagangan seks, termasuk eksploitasi seksual online anak dan permintaan dan distribusi materi eksploitasi seksual anak, termasuk konten yang melibatkan korban perdagangan manusia (Department of State United States of America, 2021).

Adanya laporan dari Filipina bahwa terdapat peningkatan drastis dalam eksploitasi seksual komersial *online* dan perdagangan seks, termasuk dalam *the online sexual exploitation of children* (OSEC) sebanyak hampir 300 persen dan di India dilaporkan adanya peningkatan permintaan serta distribusi dalam *child sexual exploitation materials* (CSEM) sebanyak 95 persen, termasuk konten konten yang melibatkan korban dalam perdagangan manusia. *Department of Justice* Filipina mencatat terdapat peningkatan tinggi dalam potensi perdagangan seks secara *online* dan kasus eksploitasi terhadap anak dari Maret hingga Mei 2020 yang mana pada masa itu sedang berada di keadaan *lockdown* atau karantina (Department of State United States of America, 2021).

Kasus eksploitasi terhadap anak secara *online* di Filipina ini meningkat sebesar 264,6% atau 202.605 laporan selama adanya masa karantina yang dilakukan dari Maret hingga Mei 2020, dibandingkan dengan 76.561 kasus selama periode yang sama pada tahun 2019 data ini diambil menurut *the Department of Justice philippines* yang juga melihat data dari Amerika Serikat yaitu *National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)* (Save the Children, 2021).

Meskipun Filipina sudah melakukan beberapa hal untuk menanggulangi kasus eksploitasi terhadap anak secara *online* ini seperti menyetujui *the International Convention on the Rights of Child* dan mengangkat beberapa

undang-undang tentang perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Namun, dengan keadaan lingkungan yang belum kondusif untuk pelaksanaan kebijakan publik, penegakan undang undang ini membutuhkan waktu yang lama dan tetap tidak merata keseluruh penjuru negara, tidak dapat dipungkiri negara membutuhkan peran aktor non negara untuk membantu dalam menangani masalah eksploitasi seksual secara *online* yang dalam fokus tulisan ini yaitu *Child Right Network*.

Child Rights Network sendiri merupakan aliansi organisasi dan lembaga terbesar yang mengupayakan undang-undang terhadap hak anak di Filipina. *Child Rights Network* ini memiliki tujuan berupa terciptanya sebuah lingkungan yang di mana semua anak dapat menikmati hak asasi mereka melalui undang-undang dan kebijakan yang responsif (Child Right Network 2021). Sejak pengesahan resminya pada tahun 2007, *Child Rights Network* telah mengantarkan pengesahan yang berupa 7 undang-undang hak anak, termasuk Undang-Undang Keadilan dan Kesejahteraan Remaja tahun 2007 dan Undang-Undang Anak dalam Keadaan Darurat tahun 2016. Beberapa program pencapaian yang dilakukan oleh *Child Rights Network* adalah *Child Protection Act* pada tahun 2007, *Anti Child Pornography* pada tahun 2009 dan *Children in Emergencies Act* pada tahun 2016 (Child Right Network, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang penanganan eksploitasi seksual anak di Filipina melalui suatu perantara seperti organisasi ataupun aliansi organisasi internasional. Dalam penelitian ini, penulis fokus dalam beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui apa saja yang yang termasuk dalam eksploitasi seksual secara *online*, mengetahui strategi *Child Right Network* dalam menangani permasalahan eksploitasi seksual secara *online* dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Filipina mengenai peraturan yang berlaku pada eksploitasi seksual secara *online*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikaji yaitu, bagaimana strategi *Child Right Network* dalam menangani eksploitasi seksual *online* terhadap anak di Filipina?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian secara kualitatif deskriptif (Zellatifanny & Mudjiyanto 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang mana teknik ini digunakan dengan cara menggunakan data-data dari literatur sebagai pencarian data sekunder (Salim & Sahrurn, 2012). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *library research* sebagai teknik pengumpulan data yang mana data data literatur yang digunakan merupakan buku, jurnal dan *website* resmi. Sedangkan hasil dari penelitian yang relevan dapat digunakan untuk menghasilkan jawaban dan juga mendukung teori yang digunakan dalam penelitian (Hartati, 2019).

Berdasarkan data dan juga sumber-sumber tersebut, penulis melakukan analisa dan menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan *boomerang pattern*, dalam konsep *transnational advocacy network*. *Boomerang pattern* ini menjadi menjadi model interaksi antara aktor karena adanya keterlambatan jalan aspirasi dari aktor domestik dalam negara ke pemerintah negara tersebut. Dalam pelaksanaan ini Keck dan Sikkink membagi pola tersebut menjadi empat bagian yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics* dan *Accountability Politics* (Dewanto, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina

Dengan maraknya kasus eksploitasi seksual secara online terhadap anak di dunia, ECPAT mengakui bahwa pemahaman akan bentuk dari eksploitasi seksual secara online terhadap anak sangat diperlukan, maka dari itu ECPAT menyediakan pemahaman yang lebih baik, adapun eksploitasi seksual secara online tersebut yaitu (ECPAT, 2017): (1) Materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi seksual terhadap anak. Materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi seksual terhadap anak lebih dipilih daripada pornografi anak untuk merujuk pada materi materi yang menggambarkan aksi kekerasan seksual. (2) *Grooming online* untuk tujuan seksual, *grooming online* untuk tujuan seksual merupakan sebuah proses dimana pelaku menggunakan internet atau teknologi digital lainnya untuk menjalin atau membangun hubungan dengan seorang anak yang akhirnya akan memfasilitasi kontak seksual *online* atau *offline* dengan anak tersebut. (3) *Sexting*, didefinisikan dengan pembuatan gambar seksual sendiri atau sebagai penciptaan, pembagian dan penerusan gambar yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan internet. (4) Pemerasan seksual, pemerasan seksual ini juga disebut dengan *sextortion* yang merupakan pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar orang tersebut (yang dibuat sendiri) dengan imbalan merupakan seks, uang atau keuntungan lainnya dari orang tersebut dibawah ancaman penyebaran materi tersebut. (5) Siaran langsung kekerasan seksual pada anak, siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan sebuah paksaan terhadap seorang anak untuk dapat berpartisipasi dalam aktifitas seksual baik dilakukan sendiri maupun dengan orang lain. Aktifitas ini pada saat bersamaan dikirim secara langsung atau disebarluaskan melalui internet dan ditonton oleh orang lain yang berjarak jauh.

Law enforcement information menunjukkan bahwa Filipina merupakan salah satu sumber eksploitasi seksual online terbesar terhadap anak anak (United States Department of State, 2021). Sekitar tahun 2010 dan 2017, terdapat 193.405 alamat IP di Filipina yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak dilaporkan, Pada 2018, setidaknya 600.000 materi pelecehan seksual anak dari Filipina dibagikan dan dijual secara online, angka ini meningkat 1.300% dari tahun sebelumnya (Child Right Network, n.d.). Secara global, pelecehan seksual secara online telah meningkat secara dramatis selama pandemi, pada 25 Mei 2020, the Philippines Department of Justice Mengkonfirmasi adanya peningkatan sebanyak 264% dalam laporan OSAEC sejak awal pandemi, dikaitkan dengan adanya penggunaan internet yang lebih tinggi selama pandemic (Arise, 2021).

Tabel 1. Peningkatan dalam Cyber Trafficking in person report di Filipina

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	418,422
2	2020	1,297,474
3	2021	2,802,712

Sumber: UNICEF Philippines Tahun: 2022

Dengan melihat data pada Tabel 1, kenaikan angka per tahun dalam eksploitasi seksual secara *online* terhadap anak, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lainnya yaitu (University of the Philippines

Manila, et al., 2016): (1) Kemiskinan yang menyebar secara luas; (2) Memiliki akses terhadap internet dan smartphone dengan mudah dan murah; (3) Anak-anak Filipina memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; (4) Eksploitasi seksual sebagai sarana pendapatan keluarga; (5) Kurangnya pengawasan yang tepat kepada anak-anak.

Studi Nasional tentang Pelecehan Seksual Online dan Eksploitasi Anak di Filipina menemukan bahwa dalam banyak kasus, misi adalah motivasi utama bagi anak-anak dan keluarga dalam memilih keputusan ini. Anak-anak yang lebih besar memperbesar pendidikan atau uang oleh orang asing yang menginginkan gambar atau video seksual mereka. Anak-anak yang lebih kecil terpicat ke rumah pelaku dengan permen dan coklat. Pelaku biasanya merupakan warga negara, dengan berusaha dalam membangun kepercayaan dan keyakinan anak-anak, menjalin hubungan persahabatan dan menjaga hubungan dengan mereka adalah tindakan grooming. Fasilitator merupakan mereka secara bersama-sama untuk melakukan hubungan seksual secara online, biasanya orang tua, kakak, atau kerabat.

Kemudian, terdapat orang terdekat anak-anak yang akan memaksa atau mendorong mereka untuk menanggalkan pakaian, melakukan tindakan seksual, memerkosa atau menyiksa mereka di depan kamera web, dan mendapatkan uang. Mereka disebut "fasilitator". Mereka bisa menjadi orang tua anak, kerabat atau tetangga. Korban ini sendiri tercatat bahwa bayi berusia 3 bulan dilaporkan menjadi korban korban dan eksploitasi online. Mereka biasanya berasal dari kalangan miskin, dan juga tinggal bersama keluarga yang sangat kekurangan dan membutuhkan uang. Anak-anak ini biasanya dipaksa oleh orang tua, kerabat, dan tetangga untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera (SaferKids PH, 2021).

3.2 Pola Strategi *Child Right Network* dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak secara Online

Child Rights Network (CRN) merupakan aliansi organisasi dan lembaga terbesar yang mendorong undang-undang hak-hak anak di Filipina. Selama hampir dua dekade, CRN telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, pakar, lembaga pemerintah, dan legislator untuk mengesahkan undang-undang yang berfokus pada hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan anak-anak. Sejak 2007, CRN telah mengantarkan pengesahan 16 undang-undang ini, yang meliputi *Children in Emergencies Act of 2016*, *Prohibition of Child Marriage Act of 2021*, dan *Increasing the Age for Determining the Commission of Statutory Rape Act of 2022*. CRN memiliki keanggotaan 58 organisasi nasional, internasional, dan lokal di seluruh negeri, termasuk dua lembaga pemerintah. Sebagai negara keanggotaan the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Filipina memiliki kewajiban negara untuk memberlakukan langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi anak-anak.

CRN berfokus pada mendorong undang-undang dan kebijakan responsif yang memungkinkan anak-anak menikmati hak asasi mereka, yang tercatat dalam UNCRC, seperti hal berikut, yaitu: (1) Penutupan eksploitasi dan pelecehan seksual anak online; (2) Meningkatkan usia untuk menentukan pemerkosaan menurut undang-undang; (3) Pencegahan kehamilan remaja; (4) Melindungi anak-anak dari tembakau dan industri tembakau; (5) Mempromosikan bentuk disiplin

yang positif dan tanpa kekerasan; (6) Memperkuat sistem pencatatan sipil dan statistik vital filipina; (7) Mengembangkan pendidikan terhadap pencegahan perdagangan manusia; (8) Membangun kerangka kerja tentang magna carta anak-anak; (9) Mendukung kode anak bangsamoro; (10) Pembentukan komisi anak-anak filipina. (11) Mempromosikan hak anak atas lingkungan yang sehat; (12) Memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak yang terdampak kampanye melawan obat-obatan terlarang.

Dengan pemaparan sebelumnya bisa dilihat bahwa *Child Right Network* juga berfokus dalam eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online*, dalam memaparkan pola strategi yang digunakan oleh *Child Right Network* dalam mencegah hal tersebut, penulis berfokus menggunakan *boomerang pattern* dalam konsep *transnational advocacy network*. Dalam konsep ini, Keck dan Sikkink menuliskan bahwa terdapat pola dalam interaksi aktor-aktor *transnasional advocacy network*, pola tersebut disebut dengan *boomerang pattern*. *Boomerang pattern* ini menjadi model interaksi antara aktor karena adanya keterlambatan jalan aspirasi dari aktor domestik dalam negara ke pemerintah negara tersebut. Dalam pelaksanaan ini Keck dan Sikkink membagi pola tersebut menjadi empat bagian yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics* dan *Accountability Politics* (Dewanto, 2017.).

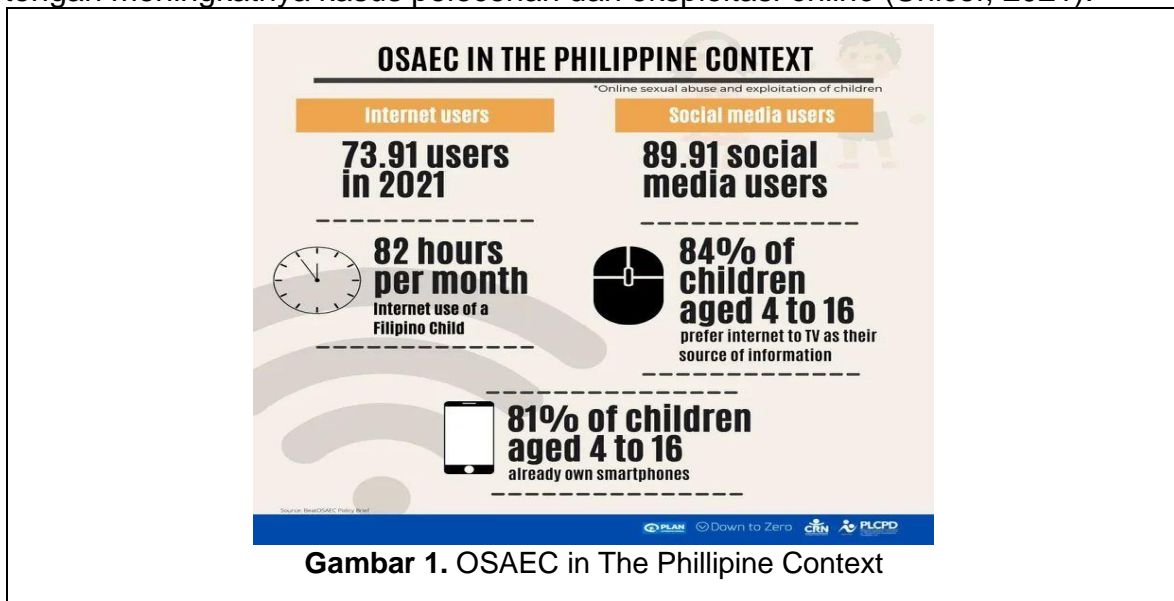
Information politics adalah kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politis dengan cepat dan dapat dipercaya ke tempat yang paling berdampak. Dalam strategi *information politics*, *Child Right Network* mengadvokasi tentang undang-undang hak anak di Filipina, mengingatkan kepada pemerintah nasional, eksekutif pemerintah daerah dan sektor swasta untuk meningkatkan upaya bersama dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual *online* di tengah keadaan karantina yang diberlakukan untuk mengatasi penyebaran covid-19 (Child Right Network, 2020).

Symbolic politics adalah kemampuan untuk membuat dan memanggil simbol simbol dari sebuah tindakan atau cerita yang terjadi untuk mampu menggambarkan keadaan atau situasi kepada masyarakat luas secara jelas. Dalam strategi *Symbolic Politics*, gerakan yang dibuat adalah *#shutdownocsea* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengadvokasi kampanye melawan eksploitasi seksual online anak (Network, 2020).

Pada 11 Februari 2020, *Child Right Network* diwakili oleh Mr. Romeo Dongeto, Direktur Eksekutif Komite Kependudukan dan Pembangunan Legislator Filipina, Mr. Niño Lasin, Petugas Perlindungan Anak dari UNICEF Filipina, Ms. Isabelle Ereñeta, Direktur Program dari ChildFund Philippines, dan Ms. Camille Madiz, Project Officer dari Plan International memimpin sebuah advokasi untuk mengakhiri eksploitasi seksual *online* terhadap anak-anak dan *#ShutDownOCSEA*. Kampanye yang dilakukan oleh *Child Right Network*, *#ShutDownOCSEA* bertujuan untuk menciptakan komunitas yang lebih proaktif yang akan (Child Right Network, 2020), yaitu: (1) *Learn*, mempelajari tentang OSEC dan dengan pemahaman yang baik maka kampanye ini akan tersebar kepada keluarga, teman, tetangga, dan kolega; (2) *Sign*, menandatangani petisi Change.Org kami, menunjukkan sebuah panggilan kepada anggota parlemen kami untuk memulai pengawasan Kongres terhadap undang-undang sehingga kami dapat melindungi anak-anak kami dari

predator seksual *online*; (3) *Report*, dapat melaporkan kasus dugaan OSEC, dengan cara menghubungi hotline yang telah tersebar.

Leverage politics adalah kemampuan untuk mengumpulkan aktor yang kuat untuk mempengaruhi situasi di mana anggota *transnational advocacy network* yang tidak memiliki pengaruh tersebut kepada masyarakat. Dalam strategi *Leverage Politics*, *child right network* mendukung upaya pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat untuk secara efektif mengekang meningkatnya jumlah kasus eksploitasi seksual *online* anak di tengah pandemi Covid-19 (Child Right Network, 2021) terdapat 73,91 juta pengguna internet pada tahun 2021, pengguna media sosial berjumlah 89 juta pengguna di Filipina, anak-anak di Filipina rata-rata menggunakan internet selama 82 jam selama sebulan, 84% anak dari usia 4 hingga 16 menjadikan internet sumber informasi daripada televisi dan 815 anak berusia 4 hingga 16 sudah memiliki smartphone mereka sendiri (Philippine Legislators' Committee on Population and Development, 2021). Maka dari itu *child right network* dan *SaferKidsPH* bergabung dalam suatu aksi untuk internet yang lebih aman dan lebih baik untuk anak-anak dan remaja di tengah meningkatnya kasus pelecehan dan eksploitasi *online* (Unicef, 2021).



Gambar 1. OSAEC in The Phillipine Context

Sumber: **Philippine Legislators' Committee on Population and Development - Beating the Online Sexual Abuse and Exploitation of Children in the Philippines Policy Brief**

Sementara *Accountability politics* adalah upaya untuk mewajibkan aktor untuk menjaga dan mengawasi kebijakan yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan mereka. Dalam strategi *Accountability politics*, adanya *Child Rights Monitoring: Focus on the Philippines* yang dilaksanakan oleh *save the children*, yang mana sejak tahun Dari 2017 hingga 2020, *Save the Children Philippines* (SCP) mendukung gerakan *Civil Society Coalition dalam the Convention on the Rights of the Child (CRC Coalition)* dan *the Children Talk to Children* tentang *UNCRC (C2C)* dalam memengaruhi Konvensi PBB tentang *The Rights of the Child (UNCRC)* dan *Universal Periodic Review (UPR)* melalui penyampaian laporan CRC dan UPR, serta melakukan lobi dengan *UN Committee the Rights of the Child (UNCRC)* dan *The UN Human Rights Council (UNHRC)* (Save The Children, 2020).

Save the Children Filipina bekerja sama dengan *child-led organizations* dalam membangun kemampuan mereka dan pemberian dukungan untuk melaksanakan child rights monitoring, serta dalam memajukan advokasi mereka di berbagai platform global mengenai *child rights reporting*. Adapun kegiatan yang mereka lakukan, yaitu: (1) *UN Convention on the Rights of the Child*, anggota dari organisasi ini terus mengikuti proses dari *the child rights monitoring* sejak tahun 2009 hingga 2020, dalam hal ini mereka melakukan konsultasi kepada anak-anak yang berada di daerah rawan dalam memahami masalah mereka lebih dalam dan melihat dari sudut pandang mereka yang selanjutnya akan disampaikan pada laporan *the Convention on the Rights of the Child*; (2) *Universal Periodic Review (UPR)*, melihat laporan UPR negara pada tahun 2017, anak-anak dilibatkan dalam orientasi mengenai UPR dan perannya dalam *The Convention on the Rights of the Child*, termasuk dalam menonton bersama siaran langsung sidang pleno UNHRC di mana delegasi Filipina mempresentasikan laporan nasionalnya tentang UPR; (3) *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sejak tahun 2019 hingga 2020, anak-anak telah mengikuti orientasi dan konsultasi mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang mana hasilnya akan dilaporkan kepada *Child Right Connect* untuk dikonsolidasikan pada laporan secara global (Save The Children, 2020).

Dalam hal ini, banyak hal pelajaran yang diambil dalam mempertahankan dan memperkuat *Child Right Monitoring*, seperti: (1) Anak-anak yang paling utama, pandangan seorang anak harus jelas dan tertulis dalam laporan; (2) Pemantauan secara terus menerus, harus selalu mengumpulkan dan menganalisis data secara teratur; (3) Memperluas kolaborasi, lebih melibatkan kelompok/koalisi human right dan juga kelompok sectoral; (4) Mempelajari masalah-masalah anak yang sedang berkembang, dapat dilakukan dengan terus melakukan sesi belajar secara internal maupun forum; (5) Mobilisasi kekuatan secara kolektif, memaksimalkan pengalaman, kelebihan dan kapasitas anggota; (6) bekerja melalui grup-grup kecil, menugaskan pekerjaan melalui kelompok tugas kecil dan kelompok kerja secara teknis; (7) memutuskan keputusan secara cepat dan efektif, yang mana menetapkan pengambilan keputusan yang jelas dan juga protokol yang tepat; (8) Berinvestasi dalam sekretariat yang memiliki kekuatan, yang mana membangun kapasitas sekretaris yang baik (Save The Children, 2020).

Dari pemaparan boomerang pattern diatas, strategi yang dilakukan oleh CRN dalam menangani eksploitasi seksual adalah mendorong undang-undang dan kebijakan responsif melalui advokasi masyarakat Filipina tentang Undang-Undang hak anak di Filipina melalui Pemerintah Nasional, daerah dan sector swasta, melalui campaign #ShutdownOCSEA, melakukan agenda Safer Internet Day, dan pelaksanaan child rights monitoring. Dari kegiatan di atas CRN menunjukkan gerakan-gerakan dalam memulai pengawasan terhadap undang-undang terkait dengan OCSEA dan untuk segera bertindak untuk melindungi anak-anak dari predator seksual online.

3.3 Kebijakan Pemerintah Filipina Terkait Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak

Department of Justice, Republic of The Philippines memberi dukungan dalam melindungi kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap anak, dukungan tersebut merupakan *Child Protection Program* yang berada dalam The Committee for the Special Protection of Children (CSPC). Hal ini merupakan perintah eksekutif No. 275 (s.1995) dengan tujuan bahwa semua anak di Filipina dilindungi dari segala

bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi. Peran dari The Committee for the Special Protection of Children (CSPC) sendiri sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran R.A. 7610 dan hukum pidana terkait anak lainnya (Department of Justice, 2018).

Department of Health, Republic of The Philippines, memberi dukungan dengan The Women and Children Protection Program (WCPP) yang mana memberikan dukungan teknis dan manajemen untuk memastikan bahwa The Women and Children Protection Program Unit (WCPU) beroperasi sebagaimana diamanatkan dalam bagian 40 dari Undang-Undang Republik 9262. Program The Women and Children Protection Program (WCPP) bertujuan untuk memberikan bantuan medis kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan penyelesaian kasus yang ditangani dengan baik di fasilitas kesehatan. Agar tercapainya tujuan ini, The Women and Children Protection Program (WCPP) berfokus pada pencegahan melalui pembentukan dan memastikan fungsionalitas Women and Children Protection Program Unit (WCPU), penguatan dalam struktur manajemen, peningkatan kemampuan petugas kesehatan masyarakat dan staf rumah sakit, promosi kesehatan, dan advokasi (Health, 2018).

Pada tanggal 23 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah meratifikasi laporan komite konferensi bikameral tentang RUU yang berusaha untuk melarang segala bentuk pelecehan seksual atau eksploitasi anak, baik *online* maupun *offline* dan sekarang dalam proses penandatanganan oleh Presiden (Cervantes, 2022) dan terhitung pada tanggal 30 Juli 2022 Undang – Undang Republik 11930 atau Undang Undang *the Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children* (OSAEC) telah resmi disahkan sebagai undang undang (Philippine News Agency, 2022).

4. Kesimpulan

Strategi yang telah dilakukan oleh *Child Right Network* dalam mengupayakan penekanan angka eksploitasi seksual secara *online* di Filipina melalui advokasi masyarakat Filipina tentang Undang Undang hak anak di Filipina melalui Pemerintah Nasional, daerah dan sector swasta, melalui campaign #Shutdown OCSEA, melakukan agenda Safer Internet Day, dan pelaksanaan child rights monitoring memberikan dampak pada pemerintah dan juga masyarakat dalam pemahaman mengapa eksploitasi seksual secara *online* ini sangat mengancam masa depan anak-anak. Kemajuan teknologi internet memang menjanjikan banyak manfaat bagi anak-anak, namun bisa menjadi tempat paling berbahaya juga bagi mereka. Masalah ini menjadi perhatian global, dengan jutaan anak yang telah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual online, atau diperas untuk tujuan seksual. Ratusan juta materi pelecehan seksual anak juga dibagikan dan diperdagangkan secara luas di internet. Berdasarkan penelitian ini, melalui strategi yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan korban yang lebih banyak dalam eksploitasi seksual secara online sehingga pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Filipina meratifikasi rancangan undang undang mengenai pelarangan segala bentuk pelecehan seksual dan pada tanggal 30 juli 2022 Undang Undang *the Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children* (OSAEC) telah resmi disahkan sebagai undang undang, dengan adanya undang undang perlindungan terhadap OSAEC ini

pemerintah dapat dengan cepat mengejar para pelanggar hukum OSAEC yang melakukan Tindakan jahat mereka melalui dunia maya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi penelitian ini, kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya, teman teman saya yang sudah memberikan support moral kepada saya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Sang Pencerah yang telah bersedia menerbitkan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Arise. (2021). Online Child Sexual Exploitation in the Philippines FACTSHEET. *Online Child Sexual Exploitation, February, 2021*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-66654-5>
- Cervantes, F. M. (2022). *House ratifies bill preventing child abuse in all forms | Philippine News Agency*. <https://www.pna.gov.ph/articles/1175130>
- Child Right Network. (n.d.). *ShutDownOSEC – Child Rights Network*. Retrieved April 27, 2022, from <https://childrightsnetwork.ph/shutdownosec/>
- Child Right Network. (2020a). *CHR | Child rights advocates urge gov't, public: Don't forget child victims of online sexual abuse & exploitation amid pandemic*. <https://chr.gov.ph/child-rights-advocates-urge-govt-public-dont-forget-child-victims-of-online-sexual-abuse-exploitation-amid-pandemic/>
- Child Right Network. (2020b). *CRN calls on the government, civil society organizations, & the private sector to #ShutDownOCSEA – Child Rights Network*. <https://childrightsnetwork.ph/shutdownocsea/crn-calls-on-the-government-civil-society-organizations-the-private-sector-to-shutdownocsea/>
- Child Right Network. (2021a). *CRN backs gov't efforts to curb online sexual exploitation of children – Manila Bulletin*. <https://mb.com.ph/2021/01/15/crn-backs-govt-efforts-to-curb-online-sexual-exploitation-of-children/>
- Child Right Network. (2021b). *Who We Are – Child Rights Network*. <https://childrightsnetwork.ph/who-we-are/#members>
- Department of Justice. (2018). *Child Protection Program :: Department of Justice - Republic of the Philippines*. <https://doj.gov.ph/child-protection-program.html>
- Department of State United States of America. (2021). *TRAFFICKING IN PERSONS REPORT*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>
- Dewanto, P. A. (2017). *Advokasi Forbali dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa Bali (2013-2017)*.
- ECPAT. (2017a). *Eksplorasi seksual pada anak online: Sebuah pemahaman bersama*. 1–52.
- ECPAT. (2017b). *online child sexual exploitation, a common understanding*.
- Hartati, I. N. dan S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. <https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ>
- Health, D. of. (2018). *Women and Children Protection Program*.

- <https://doh.gov.ph/health-programs/women-and-children-protection-program>
- Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N. (2022). Upaya Korea Women'S Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Ranah Politik Korea Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.288-300>
- Network, C. R. (2020). *Shutdown OCSEA – Child Rights Network*. <https://childrightsnetwork.ph/shutdownocsea/>
- Philippine Legislators' Committee on Population and Development. (2021). *[Policy Brief] Beating Online Sexual Abuse and Exploitation of Children in the Philippines*.
- Philippine News Agency. (2022). *Internet now safer for kids with anti-online sexual abuse law | Philippine News Agency*. <https://www.pna.gov.ph/articles/1180657>
- SaferKids PH. (2021). *Learn About OSAEC - SaferKids PH*. <https://www.saferkidsph.org/learn-about-osaec/>
- Salim & Sahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 1–397).
- Save the Children. (2021). *Online sexual abuse of children rising amid COVID-19 pandemic*. Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/philippines/online-sexual-abuse-children-rising-amid-covid-19-pandemic-save-children>
- Save The Children, P. (2020). *Child Rights Monitoring : Focus on the Philippines*.
- Unicef. (2021). *The Child Rights Network and SaferKidsPH join the call for a safer and better internet for children and young people amid rising cases of online abuse and exploitation*. <https://www.unicef.org/philippines/press-releases/child-rights-network-and-saferkidsph-join-call-safer-and-better-internet-children>
- United States Department of State. (2021a). *2021 Trafficking in Persons Report - United States Department of State*. <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/>
- United States Department of State. (2021b). *2021 Trafficking in Persons Report - United States Department of State*. <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/>
- United States Department of State. (2021c). *Philippines - United States Department of State*. <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/philippines/>
- United States Department of State. (2021d). *South Korea - United States Department of State*. <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/south-korea/>
- University of the Philippines Manila, The University of Edinburgh, Child Protection Network Foundation and Unicef Philippines, 2016. (2016). A Systematic Literature Review of the Drivers of Violence Affecting Children - the Philippines. *Unicef*, 204.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>